

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GUNUNGGURUH KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI

Fadjar Tri Sakti^{1)*}, Muhamad Rizki Paisal¹⁾, Muhammad Rohmatullah¹⁾,
Nadiya Asyri Nur Fadillah¹⁾, Putri Siti Nur Ihsani¹⁾
UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾
Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id*

Riwayat Artikel

Diterima: 27 Juli 2022

Disetujui: 28 Agustus 2022

Diterbitkan: 13 September 2022

Abstract

The role of village government leadership has succeeded in increasing community participation in village development. The success of the leadership of the current village government is that the village government, especially the village head, is able to increase the community's sense of caring for village development which is manifested in the form of active participation so that people feel valued for their existence. The purpose of this research is to know and describe the leadership of the village government to increase community participation in village development, to know the driving factors for the leadership role of the village government, to know what areas of development are being carried out by the village government, and to find out what efforts are made by the village government in increasing participation. community in rural development. Data collection using primary data resulting from data collection carried out by observation, interviews, and literature studies with a qualitative descriptive approach.

Keywords: Participation, Village Government, Village Development

Abstrak

Peran Kepemimpinan pemerintah desa yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keberhasilan pada masa kepemimpinan pemerintah desa saat ini yaitu pemerintah desa terkhusus kepala desa yang mampu meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap pembangunan desa yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi secara aktif, sehingga masyarakat merasa dihargai keberadaanya. Tujuan dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui dan deskripsi kepemimpinan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, mengetahui faktor pendorong peran kepemimpinan pemerintah desa, mengetahui apa saja bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengumpulan data menggunakan data primer dihasilkan dari pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa

A. PENDAHULUAN

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) atau dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma yang berlaku. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya. Hal ini bertujuan agar mereka berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahwa kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa (Presiden RI, 2014). Pembangunan umumnya berawal dari masyarakat dan akibatnya memang diperuntukan kepada masyarakat itu sendiri. Pemerintah desa berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Alasan pertama memilih objek penelitian ini untuk mengetahui bagaimana deskripsi kepemimpinan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Gunungguruh. Alasan kedua, mengenai apa saja faktor pendorong peran kepemimpinan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Alasan ketiga, Untuk mengetahui bidang apa saja yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan alasan yang terakhir upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi desa dalam pembangunan di desa gunungguruh.

Pembangunan desa yang berorientasi pada bidang infrastruktur, bidang olahraga, bidang keagamaan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat bermula dari pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan pembangunan, tahap pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Gunungguruh.

B. KAJIAN PUSTAKA

Peran

Peranan sosial merupakan tanggung jawab manusia dalam mengusahakan kelangsungan hidupnya dalam masyarakat yang ditentukan oleh suatu masyarakat itu sendiri. Peran sosial adalah merupakan pola perilaku yang diharapkan (*expected behavior*) yang berkaitan dengan status atau kedudukan sosial seseorang dalam suatu kelompok atau situasi sosial. Peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan individu ketika menduduki suatu posisi, sebuah sudut pandang dalam sosiologi yang menganggap sebagian besar aktivitas harian yang diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manager, guru).

Sebagaimana mengutip dari jurnal konsep kinerja dalam studi administrasi publik (Engkus,Ishak.D,Yosep.D, 2017) bahwa teori peran itu bagaimana ekspektasi individu terhadap perannya dipengaruhi oleh atribut pribadi dan konteks dimana dia berada. Karenanya, teori peran menyatakan bahwa kinerja individu tidak lain merupakan fungsi individual dan organisasi. Teori

peran ini, dengan demikian, merepresentasikan penjelasan mengenai kinerja yang mengkombinasikan perspektif psikologi (kontribusi individual) dan sosiologi (kerangka kerja organisasi)

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut: a.) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. b.) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c.) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007:213).

Kepemimpinan

Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Tipe-tipe kepemimpinan menurut Max Weber dibagi menjadi tiga yaitu: a.) Kepemimpinan Tradisional merupakan kepemimpinan yang berasal dari garis keturunan atau suku. Kepemimpinan tradisional juga tidak mempunyai penataan rasional relasi-relasi superioritas dan inferioritas; ia kekurangan hierarki yang jelas. b.) Kepemimpinan Kharismatik merupakan mempunyai kapasitas untuk mengubah sistem sosial yang ada berdasarkan persepsi pengikut yang pemimpin ditakdirkan mempunyai kemampuan istimewa. Kepemimpinan kharismatik tidak mendasar kepada otoritas formal atau kekuasaan posisional, akan tetapi pada kekuasaan personal. (Wirawan, 2013:164). c.) Kepemimpinan Rasional Regal merupakan pemimpin yang memperoleh peraturan yang diberlakukan secara hukum dan nasional.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah proses pemanduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan, antara lain sebagai berikut: a.) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. b.) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berlandaskan hak asli usul desa. c.) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. d.) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya. Adapun perangkat desa terdiri dari sekretaris dan perangkat lainnya seperti urusan pemberdayaan aparatur pemerintah desa dalam pembangunan. Pemerintahan, urusan pembangunan, urusan umum, urusan kesejahteraan masyarakat, dan urusan keuangan. Dimana memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemerintahan kabupaten dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari Pemerintah desa dan BPD, hingga penyelenggara pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian untuk menyelenggarakan pemerintah desa agar berjalan dengan baik maka diperlukan suatu susunan organisasi. Adapun

struktur organisasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengatur antar hubungan antar bawahan-atasan dan hubungan antar staf yang sederajat kedudukannya dalam organisasi.

Struktur Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan adalah penyelenggaraan pemerintah desa. Seorang kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PP No.75 Tahun 2005, kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut: 1.) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 2.) Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4.) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5.) Melaksanakan kehidupan demokrasi. 6.) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. 7.) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa. 8.) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. 9.) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 10.) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.(Presiden RI,2005).

b. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu, sekretaris desa adalah seseorang pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Sedangkan, perangkat-perangkat lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sementara itu, anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan sebanyak 11 orang dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/disusulkan kembali untuk satu kali jabatan berikutnya. (Danur Lumady, 1988: 165).

Fungsi Pemerintahan Desa

Fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, sebagai berikut: a.) Instruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. b.) Konsultatif. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan pertimbangan dan memerlukan konsultasi dengan masyarakat yang dipimpinnya. c.) Partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya dilakukan secara terkendali dan terarah. d.) Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya

berarti kepercayaan. e.) Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berarti peran serta seorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi. serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut (H.A.R Tilaar) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dan keinginan untuk mengembangkan demokrasi adalah proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Keith Davis partisipasi adalah ketertarikan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Satropoetro (1988), mengemukakan bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut, yaitu : a.)Pikiran, b.) Tenaga, c.) Pikiran dan tenaga d.) Keahlian,e.)Barang, f.)Uang.

Tahapan Partisipasi Masyarakat

Yadav (UNAPDI, 1980) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut: 1.) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. b.) Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan. Harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. c.) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan. Merupakan unsur penting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. d.) Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, metode kualitatif adalah yang menggambarkan karakteristik suatu kelompok tertentu dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Seperti masalah yang telah dijelaskan mengenai tingkat pembangunan di Desa Gunung guruh masih adanya program-

program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat, yang ditandai dengan tidak semua masyarakat mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau (gabungan).

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : a.) Observasi. Observasi yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi partisipasi dan non partisipasi. Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari informan tentang peran kepemimpinan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Gunungguruh. b.) Wawancara. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2013 : 186). Adapun objek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah : Kepala Desa dan Perangkat Desa, Masyarakat desa Gunungguruh yang merupakan tokoh masyarakat, masyarakat biasa, dan para pemuda Desa Gunungguruh. c.) Studi Kepustakaan. Adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan, dilakukan dengan cara penelaahan naskah, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Bisri Cik Hasan, 2003 : 26).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Pemerintah Desa

Desa Gunungguruh merupakan salah satu desa di Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah 349.110 ha. Desa Gunungguruh memiliki peranan besar dalam proses pembangunan di tingkat desa. Peranan aparat desa sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Desa Gunungguruh merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah 3491.100 km² yang terdiri dari 4 dusun dan 63 Rukun Tetangga (RT). Kepemimpinan desa Gunungguruh saat ini mengalami kemajuan dan perubahan kerah yang lebih baik terutama dalam pembangunan desa.

Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintah Desa Gunungguruh adalah sebagai berikut:

1. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun Tugas BPD (Badan Perwakilan Desa) diantaranya: a.) Membahas rancangan peraturan bersama kepala desa. b.) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. c.) Mengusulkan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. d.) Membentuk panitia pemilihan kepala desa. e.) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. f.) Menyusun tata tertib BPD.

Hak-hak BPD (Badan Perwakilan Desa) diantaranya: a.) Meminta keterangan kepada pemerintah desa. b.) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. c.) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. d.) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. e.) Memproses pemilihan kepala desa. f.) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

2. Kepala Desa

Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Mengajukan rancangan peraturan Desa. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah

mendapatkan persetujuan bersama BPD. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Membina kehidupan masyarakat Desa. Membina ekonomi desa. g.) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,

3. Sekretaris Desa

Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Fungsi: a.) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa. b.) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepada berhalangan. c.) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara. d.) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. e.) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan.

4. Kaur Pemerintahan

Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa. Fungsi: a.) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan. b.) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa. c.) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan. d.) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Desa.

5. Kaur Kesejahteraan

Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Fungsi: a.) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan. b.) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama. c.) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan e.) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

6. Kaur Pelayanan

Tugas Pokok: Melaksanakan tugas operasional dibidang pelayanan. Fungsi : a.) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa. b.) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa. c.) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk. d.) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian.

7. Kaur Keuangan

Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Fungsi : a.) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa. b.) Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan c.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

8. Kepala Urusan (Kaur) Umum

Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi: a.) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian atas kearsipan. b.) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa. c.)

Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum. d.) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor .

9. Kaur Perencanaan

Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Fungsi: a.) Menyusun rencana kerja tindak lanjut program dan kegiatan Kaur Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kerja. b.) Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta menyusun rencana kebutuhan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan. c.) Mengelola dan Mengarsipkan dokumen perencanaan yaitu RPJMDesa dan RKP Desa serta dokumen Laporan Kegiatan pemerintah desa semester dan tahunan. d.) Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APBDDesa semester dan tahunan. e.) Membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan APBDDesa yang sedang berjalan kepada perbekel melalui sekretaris desa.

10. Kepala Dusun (Kadus)

Tugas:

- Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya

Fungsi: a.) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah dusun. b.) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian. c.) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Gunungguruh

- Proses Terpilihnya Kepala Desa

Keberhasilan Ibu Tati Kusniawati dalam menduduki jabatan sebagai kepala desa perempuan pertama di Desa Gunungguruh menjadi tantangan bagi dirinya untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa seorang perempuan pun berhak menduduki posisi setara dengan seorang laki-laki terkhusus dalam ranah sistem pemerintahan. Sesuai dengan kriteria bahwa Ibu Tati Kusniawati sebagai kepala desa Desa Gunungguruh pantas menjadi seorang pemimpin karena beliau telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki sebuah pengaruh, kekuasaan dan wewenang. Berdasarkan wawancara dengan Pak Aceng sebagai Kaur Pemerintahan beliau mengungkapkan bahwa Ibu Tati memiliki pengaruh, mampu mempengaruhi masyarakat Desa Gunungguruh dan memberikan dukungan dengan apa yang telah menjadi tanggung jawab sebagai kepala desa. Kekuasaan dan wewenang keduanya sangat dimiliki oleh setiap pemimpin, sama halnya dengan Ibu Tati beliau memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur kemajuan dan keberlangsungan Desa Gunungguruh.

Peran Kepemimpinan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Gunungguruh yang diperoleh melalui wawancara dan observasi maka deskripsi peran kepemimpinan kepala Desa Gunungguruh diantaranya adalah:

1. Pendekatan Sifat (*Trait Approach*)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemuda di Desa Gunungguruh beliau mengungkapkan bahwa kecerdasan yang Ibu Tati tunjukkan yaitu ketika beliau dihadapkan

dengan suatu hambatan atau problem dimana beliau dengan bijak menentukan sebuah keputusan dengan tepat. Misalnya, ketika beliau menerima aspirasi dari masyarakat tentang rusaknya jembatan yang biasa digunakan untuk melewati desa ke kota madya mulai rusak dan berlubang sehingga dapat mengganggu kenyamanan dalam berkendara Ibu Tati langsung menentukan tindakan agar jembatan tersebut segera diperbaiki dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih bagus.

2. Pendekatan Kekuasaan (*Power Approach*)

Dalam pengertiannya, kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu (*a quality inherent in an interaction between two or more individuals*). Berdasarkan wawancara dengan Teguh sebagai Kaur perencanaan desa Gunungguruh beliau mengungkapkan bahwa Ibu Tati selalu menghargai hasil kerja keras seseorang, jika perangkat desanya mampu bekerja dengan baik dan bertanggung jawab maka Ibu Tati akan memberikan suatu ganjaran berupa uang/gaji sesuai dengan dana APBD, ataupun ganjaran berupa dukungan moril supaya bawahannya bekerja lebih giat lagi. Tapi sebaliknya jika kinerja orang tersebut kurang memuaskan maka rewardnya orang tersebut akan diberhentikan atau pemutusan kerja.

3. Pendekatan Perilaku (*Behaviour Approach*)

Pendekatan perilaku yang ditunjukkan Ibu Tati dalam memimpin Desa Gunungguruh yaitu dengan piawai dalam pembagian kerja. Pembagian kerja disini diartikan sebagai pengalihan sebagian wewenang formal pemimpin kepada bawahannya tanpa pandang bulu asalkan dia mampu dia maka dia berhak untuk mengemban tugasnya. Ibu Tati pun memberi pengawasan dan bimbingan, membina disiplin kerja para bawahannya serta membangun komunikasi yang berjalan baik dimana kepala desa dan aparatnya selalu bersifat terbuka.

Selain pendekatan perilaku yang ditunjukkan kepada para bawahannya Ibu Tati juga melakukan pendekatan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kepandaianya menjalin interaksi dengan masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan Ibu Tati mampu menarik perhatian masyarakat Desa Gunungguruh karena kepribadiannya yang dimilikinya sehingga pantas dijadikan figure seorang pemimpin perempuan yang cerdas.

Faktor Pendorong Peran Kepemimpinan Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Adanya Potensi Sumber Daya Alam. Terkait sumber daya alam yang dimiliki Desa Gunungguruh ada beberapa sumber daya alam yang bisa dijadikan kekayaan atau aset berharga dengan luas wilayah seluas 349.110 Ha yang terdiri dari tanah persawahan 150 H, dan tanah darat seluas 345.145 Ha. Salah satu tiang penyangga perekonomian Desa Gunungguruh berada pada sektor pertanian. Dengan beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Gunungguruh maka akan menjadi salah satu faktor pendukung peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 2.) Tersedianya Anggaran untuk Pembangunan. Anggaran program dan kegiatan pembangunan Desa Gunungguruh mengacu pada RPJM Desa. Pada program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan generasi muda. 3.) Adanya Orientasi Untuk Maju (Masa Depan). Adanya orientasi untuk maju yaitu dimana masyarakat memiliki pemikiran-pemikiran yang mengutamakan masa yang akan datang, dapat berakibat mulai terjadinya perubahan-perubahan dioreintasikan pada perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang ada. 4.) Adanya Sinergitas yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat. Adanya sinergitas disini yaitu terjalinnya kerjasama dan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat sehingga menghasilkan

suatu keselarasan dalam roda pemerintahan dan didukung juga oleh budaya gotong royong yang sangat melekat di kehidupan masyarakat Desa Gunungguruh, sehingga apa yang dilakukan pemerintah selalu didukung oleh masyarakat. 5.) Dukungan Sosial. Pada awalnya, masyarakat Desa Gunungguruh ragu dengan kepemimpinan Ibu Tati karena dengan seiring berjalannya waktu setelah masyarakat melihat progress dalam segala bidang terutama dalam bidang infrastruktur dan pelayanan masyarakat sangat dirasakan perubahan dan manfaatnya. Dengan adanya dukungan tersebut akan memudahkan kepala Desa dalam mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat dalam program-program Desa. 6.) Dukungan Keluarga. Seperti halnya yang dirasakan oleh Ibu Tati dari pihak keluarga sangat mendukung dirinya untuk menjadi kepala Desa di Desa Gunungguruh. Didukung pula oleh faktor keturunan yang mayoritas keluarganya memiliki riwayat pernah menjabat dalam roda pemerintahan. 7.) Memperjuangkan Gender. Ibu Tati Kusniawati merupakan kepala Desa perempuan pertama di Desa Gunungguruh yang sukses merubah pemikiran masyarakat yang tradisional menjadi lebih terbuka, apalagi terhadap pemerintahan dimana perempuan pun mampu untuk memimpin roda pemerintah Desa. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gender merupakan perbedaan tingkah laku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk (*socially constructed*). Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial budaya yang cukup panjang. Ini dibuktikan oleh Ibu Tati Kusniawati sebagai seorang pemimpin kepala Desa Gunungguruh yang berhasil membuktikan bahwa beliau mempunyai sifat yang kuat, tangguh, rasional dan perkasa dalam memimpin masyarakatnya, sehingga dapat memajukan Desa Gunungguruh.

Bidang Pembangunan yang di Lakukan oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Gunungguruh

1. Bidang Infrastruktur

Dalam bidang infrastruktur Desa Gunungguruh mengalami kemajuan yang cukup pesat. Ada beberapa infrastruktur yang dibangun dengan keterlibatan masyarakat setempat. Bapak Rohimat menuturkan bahwa, pembangunan infrastruktur di Desa Gunungguruh pada masa kepemimpinan Ibu Tati yaitu jembatan selakosa dibangun pada tahun awal 2017. Kedua, yaitu perbaikan jembatan Mulut yang mulanya terbuat dari bambu hingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, kini pemerintah desa memperbaruinya dengan membangun jembatan berbahan baku besi, jembatan tersebut sangat memberikan peranan penting bagi masyarakat Desa Gunungguruh karena jembatan tersebut menjadi titik sentral yang mana dapat menghubungkan masyarakat dari desa ke kota madya. Kemudian pembangunan tempat peribadatan seperti pembangunan masjid Jami' Qubattul Fahilin, mushola serta MCK yang bahan-bahannya dihasilkan dari keterampilan masyarakat setempat seperti genteng, batu bata, dan pasir. Pembangunan yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian khalayak umum adalah pembangunan wisata alam yang merupakan hasil inisiatif masyarakat setempat yaitu Bukit Karang Numpang. Dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan infrastruktur Kepala Desa mengadakan musyawarah dan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya sehingga masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif demi kesejahteraan dan kemajuan Desa Gunungguruh.

1. Bidang Olahraga

Dalam bidang olahraga pemerintah Desa Gunungguruh memberikan perhatian kepada para pemuda dalam meningkatkan potensi kepemudaan dan olahraga. Kepala desa memfasilitasi dengan membangun beberapa lapang bulu tangkis, selain itu beliau membangun lapangan voli, tenis meja dan lapang sepak bola dan untuk bidang sepak bola sekarang mereka memiliki

pengurus *club* sepak bola sehingga segala sesuatunya lebih terkoordinir dengan rapih. Pembangunan beberapa fasilitas olahraga tersebut bertujuan agar waktu senggang generasi muda masa kini benar-benar digunakan dengan hal-hal positif serta merupakan salah satu cara untuk menimalisir adanya perilaku menyimpang. Disamping mereka bisa menggali, mengembangkan potensi dan menyalurkan bakat dibidang olahraga.

2. Bidang Keagamaan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemuda mengungkapkan bahwa ada beberapa kegiatan atau program yang dimiliki oleh remaja masjid Desa Gunungguruh, kegiatan tersebut diantaranya : menyelenggarakan pengajian remaja, menyelenggarakan bimbingan membaca Al-Quran untuk anak-anak usia dini atau punkut kaum remaja yang dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB atau setelah ba'da magrib, selain itu remaja masjid dilatih agar belajar mengisi ceramah-ceramah di majlis ta'lim mingguan ibu-ibu sehingga mereka akan terbiasa dikemudian hari, untuk saat-saat tertentu seperti pada bulan puasa ramadhan program remaja masjid tersebut yaitu mengadakan tadarus Al-Qur'an dengan mengajak ibu-ibu Desa Gunungguruh yang dilaksanakan setiap hari pukul 01.00 WIB selama bulan ramadhan, mengadakan MABIT (Malam Bina Taqwa) pada malam ke 15 Ramadhan, hingga ditutup dengan buka bersama.

a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada bidang pemberdayaan masyarakat ada beberapa program sehingga masyarakat Desa Gunungguruh merasa lebih berdaya dan lebih produktif dibanding sebelumnya. Kegiatan pemberdayaan tersebut diantaranya: 1.) Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani. Masalah-masalah yang dihadapi petani adalah dalam bidang pemasaran, keterampilan, pengetahuan, sumber daya dan motivasi. Dalam hal masalah penyelesaian masalah tersebut diperlukan suatu keompok tani.2.) Kegiatan Pengolahan Sampah Menjadi Biogas.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Gunungguruh

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Ibu Tati Kusniawatiserta perangkat desa lainnya diantaranya adalah: 1.) Memberikan Pemahaman dan Dorongan untuk Berpartisipasi. Salah satu upaya Ibu Tati dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan menggiring masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Upaya pertama yaitu peran kepala desa adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya menumbuhkan rasa cinta terhadap desa yang kita tinggali setelah sekian lamanya, demi keberlangsungan hidup yang aman dan sejahtera maka kita perlu untuk menjaga dan memberikan sumbangsih kita sebagai bukti atau bentuk cinta kita kepada Desa Gunungguruh serta memberikan dukungan juga semangat kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Partisipasi dalam bentuk pikiran, tenaga, keahlian, barang ataupun uang. Ibu Tuti menambahkan bahwa dalam memberikan dorongan atau semangat kepada masyarakat, beliau menyelipkannya dalam setiap acara-acara atau moment dimana masyarakat berkempul dalam satu tempat, misalnya pengajian mingguan. 2.) Memberikan Wadah/Ruang untuk Berpartisipasi. Beberapa ruang tersebut terdapat dalam beberapa tahap, diantaranya : a.) Pengambilan Keputusan. Dalam hal tersebut masyarakat Desa Gunungguruh akan diberi ruang dan dibebaskan memberikan usulan atau ide-ide, saran dan kritik tentang pembangunan desa dengan cara melalui rapat atau pertemuan yang diadakan antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Entang sebagai salah satu pemuda di Desa Gunungguruh mengungkapkan bahwa, masyarakat merasa senang dan merasa dihargai eksistensinya sehingga masyarakat dapat dengan leluasa mengungkapkan pendapatnya pada forum khusus yang disediakan oleh pihak pemerintah setempat tanpa mengeluarkan pendapatnya bukan pada tempatnya.

Terkait prosedur yang diberlakukan untuk setiap pertemuan, setiap dusun diberi kuota minimal 10 orang untuk mengikuti musyawarah bersama. Musyawarah tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan sekali ataupun bisa kondisional terdiri dari tokoh agama, ketua RW, RT, para pemuda, dan warga masyarakat. Desa Gunungguruh memiliki empat dusun, maka jumlah warga secara keseluruhan yang mengikuti musyawarah untuk pengambilan keputusan berjumlah 40 orang. b.) Pelaksanaan Pembangunan . Pada dasarnya partisipasi dalam pembangunan ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung. Pak Aceng mengungkapkan bahwa pada tahap ini merupakan implementasi dari hasil rapat atau musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat. Pada pelaksanaannya masyarakat dapat memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, pikiran, keahlian, barang, maupun sumbangan dana.

Untuk teknisnya, pihak pemerintah desa akan menginformasikan dan memberikan perintah kepada para kadus agar dapat mengkoordinasikan kepada bawahannya dan seluruh masyarakat Desa Gunungguruh agar masyarakat terlibat dalam pembangunan tersebut. Misalnya, pemerintah Desa Gunungguruh akan membangun jembatan besi untuk menunjang kehidupan sehari-hari warga yang mana jembatan tersebut akan digunakan sebagai alat penghubung antara desa dan kota madya. Setelah para kadus menginformasikan kepada RT dan RW, maka RT dan RW akan menyebarkan informasi tersebut melalui beberapa forum atau kegiatan dimana masyarakat berkumpul pada kegiatan tersebut. c.) Pemanfaatan Hasil Pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah partisipasi dalam bentuk menggunakan, menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa. bu yuyu mengungkapkan bahwa dalam pemanfaatan hasil pembangunan ini masyarakat banyak merasa kegunaannya lebih dari sebelumnya, dulu sebelum masyarakat dilibatkan ada beberapa pembangunan tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat hanya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Selain itu masyarakat tak hanya cukup menggunakan atau menikmati hasil pembangunan tetapi patut menjaga, memelihara pembangunan tersebut. Dalam upaya untuk merawat juga menjaga masyarakat akan mengadakan jumsih (jum'at bersih) masyarakat akan membersihkan jalan desa, membersihkan masjid, mushola, ataupun jika ada gang-gang yang sudah rusak atau cat yang mulai mengelupas atau memudar masyarakat akan segera bertindak untuk memperbaikinya. d.) Evaluasi Hasil Pembangunan. Ibu Tati menuturkan bahwa partisipasi dalam evaluasi hasil pembangunan ini lebih kepada penilaian dalam mengawasi dan mengontrol setiap pembangunan yang sedang berjalan. Tujuan dari evaluasi ini juga dapat dijadikan pembelajaran dan bahan pertimbangan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kedepannya. Untuk melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan masyarakat yang membahas dan membicarakan hasil-hasil dari pembangunan desa yang sudah dilaksanakan. Pada proses evaluasi selain membicarakan hasil-hasil dari pembangunan yang sudah dilaksanakan, masyarakat Desa Gunungguruh juga sering memberikan penilaian berupa menyampaikan kritik dan saran , atau masukan-masukan mengenai pembangunan desa yang sudah dilaksanakan kepada pemerintah desa.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa selain memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi seperti tak cukup sampai tahap itu. Karena pada kenyataannya, hal tersebut dijaga eksistensinya untuk menjaga agar semuanya tetap berjalan sebagai mana mestinya maka Ibu Tati sering melakukan beberapa rangkaian kegiatan agar diluar forum resmi, sehingga masyarakat benar-benar merasa diberdayakan.

D. SIMPULAN

Kepala Desa Gunungguruh saat ini diduduki oleh seorang kepala Desa perempuan yaitu Ibu Tati Kusniawati, peran beliau dalam memimpin dan menggiring masyarakat sehingga masyarakat mau terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa merupakan hasil dari sebuah kerja keras beliau dan perangkat desanya. Faktor pendorong peran kepemimpinan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diantaranya; tersedianya potensi sumber daya alam, tersedianya anggaran untuk pembangunan, adanya orientasi untuk maju (masa depan), adanya sinergitas yang baik antarpemerintah dan masyarakat, dukungan sosial, dukungan keluarga, dan memperjuangkan gender. Bidang pembangunan desa pada masa kepemimpinan pemerintah desa saat ini membawa Desa Gunungguruh menjadi desa yang lebih maju dan lebih sejahtera dari pada sebelumnya. Pembangunan desa yang sudah terealisasi diantaranya: pada bidang infrastruktur salah satunya beberapa pembangunan jembatan, masjid, dan pembangunan pariwisata Karang Numpang, bidang keagamaan pemerintah desa membentuk remaja masjid sebanyak 23 orang, bidang olahraga memperbanyak lapang berolahraga dan bidang pemberdayaan masyarakat adanya peningkatan kapasitas kelompok tani dan pengolahan sampah menjadi biogas.

REFERENSI

- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra. (2012). *Ekologi Pemerintahan*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Engkus, E., & Ulfah, N. (2019). Analisis Kinerja Pegawai Bagian Pelayanan Di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Subang. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 39-61.
- Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 101-120.
- Hurairah, Abu. (2011). *Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Poerkawatja, Soegarda. (1981). *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Ritzer, Goerge Douglas J. Goodman, Edit Tri Wibowo Budi Santosa. (2012). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenida Media Group
- Rizqina, Finna. (2010). *Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitish Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman. (2013). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Wirawan. (2013). *Kepemimpinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.